

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT PADA PENGUNGKAPAN ETIKA SUKARELA

Laili Salsabila, Muchamad Syafruddin¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of audit committee characteristics such as audit committee expertise, frequency of meeting of audit committee, audit committee size, audit committee tenure, dan multiple directorship of audit committee member on voluntary ethics disclosure in Indonesian companies.

The population in this study were all companies registered in Indonesia Stock Exchange for the year 2018. The sampling method used in this research was purposive sampling. Total number of samples used in this study were 98 study samples. The data used in this study were obtained from companies' annual report. The data in this study were analyzed using multiple regression techniques. The data in this study were also analyzed using classical assumption test before they were analyzed using multiple regression techniques. Other than classical assumption test, the data in this study were also analyzed using pearson correlation test. The results of this study indicate that audit committee expertise have no effect on voluntary ethics disclosure. While frequency of meeting of audit committee, audit committee size, audit committee tenure have positive effect on voluntary ethics disclosure and multiple directorship of audit committee has negative effect on voluntary ethics disclosure.

Keywords: Audit Committee Characteristics, Voluntary Ethics Disclosre

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan apabila dilihat dari perspektif regulasi adalah suatu mekanisme untuk memastikan perusahaan patuh dengan peraturan yang berlaku (Rezaee, dkk, 2012). Tata kelola perusahaan juga merupakan suatu mekanisme yang memiliki fungsi memastikan perusahaan beretika dalam menjalankan usaha supaya tidak merugikan pemilik perusahaan. Etika merupakan aspek yang sangat penting agar usaha tersebut berjalan sesuai dengan hukum, peraturan-peraturan dan kode-kode yang ada. Menurut Rezaee, dkk (2012), etika dalam bisnis dapat didefinisikan sebagai moral dasar dan juga standar etika yang mengarahkan perilaku-perilaku perusahaan.

Jatuhnya perusahaan-perusahaan raksasa yang sebelumnya menjadi panutan seperti Enron, WorldCom, dan Parmalat menunjukkan konsekuensi ekstrem yang mengancam perusahaan ketika perusahaan memilih untuk mempraktikkan hal-hal tidak etis dalam menjalankan bisnisnya (Muhammad, Shahimi, Yahya dan Mahzan, 2009). Terjadinya skandal-skandal perusahaan akibat tindakan tidak etis dapat merugikan berbagai pihak dan lembaga ekonomi seperti, pasar, investor, aturan-aturan pelaporan bisnis, dan pemberi tugas yang bertugas melindungi kelompok-kelompok kepentingan contohnya seperti pelanggan, regulator dan badan legislatif (Bealing dan Baker, 2006). Banyaknya kegagalan dan skandal-skandal perusahaan menyebabkan pencegahan lebih dini untuk perilaku-perilaku tidak etis sebelum perilaku-perilaku tersebut meluas sangatlah penting. Leone (2010) dan Persons (2013) menyoroti lebih jauh bahwa perilaku tidak etis memiliki dampak-dampak negatif bagi perusahaan. Perilaku-perilaku tidak etis menodai citra dan reputasi

¹ Corresponding author



perusahaan; mempengaruhi profitabilitas dan nilai pasar perusahaan; merugikan perusahaan dan pemegang sahamnya dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Friedman (2008) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya membutuhkan *financial bailout* tetapi perusahaan juga membutuhkan *ethical bailout*.

Guna menyelamatkan perusahaan dari tindakan-tindakan tidak etis, perusahaan perlu melakukan pengungkapan etika. Menurut Sullivan dan Shkolnikov (2006), pengungkapan etika adalah sebuah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan mereka. Pengungkapan etika itu sendiri termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dibuat dengan cara sukarela oleh perusahaan-perusahaan tertentu, di mana pengungkapan itu dibuat melebihi persyaratan pengungkapan yang dimandatkan (Qu, Cooper, Wise, dan Leung, 2012). Informasi-informasi yang termasuk dalam pengungkapan sukarela adalah informasi keuangan, informasi non-keuangan, dan informasi strategis (Eng dan Mak, 2003). Selain itu, menurut Rouf (2011), tingkat pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor-faktor ekonomi, perubahan pada perilaku masyarakat, dan faktor perilaku seperti budaya perusahaan

Sedangkan pentingnya melakukan pengungkapan bagi perusahaan menurut Akhtaruddin pada tahun 2010 adalah untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan dan pasar modal. Gul dan Leung (2004) juga berpendapat bahwa pengungkapan adalah sebuah syarat penting bagi pasar modal supaya pasar modal dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, Lobo dan Zhou (2001) juga berpendapat bahwa pengungkapan yang lebih baik berhubungan dengan peningkatan transparansi dan pengurangan kesenjangan informasi antara perusahaan dan investor, di mana hal tersebut akan membawa pada peningkatan nilai perusahaan. Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Barry & Brown (1985), Fishman & Hagerty (1989), Diamond dan Verrechia pada tahun 1991, dan juga Peters, Abbott, dan Parker pada tahun 2000, yang telah menunjukkan bahwa nilai perusahaan bisa ditingkatkan dengan meningkatkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pradana pada tahun 2017 juga berpendapat bahwa salah satu manfaat dari pengungkapan sukarela adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan karena pengungkapan sukarela menjadikan informasi pada laporan tahunan semakin relevan bagi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Sebuah mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memastikan perusahaan telah menerapkan praktik-praktik etis dan melakukan tanggung jawabnya mengenai etika adalah komite audit. Pada tata kelola perusahaan, peran komite audit adalah sebuah subjek peningkatan kepentingan regulasi (Abbott, Parker dan Peters, 2003). Komite audit membantu dalam meningkatkan pengungkapan etika sukarela (*voluntary ethics disclosure*) pada perusahaan dan secara efektif mengawasi manajemen. Penelitian ini fokus kepada komite audit karena kebanyakan perusahaan telah menetapkan tugas untuk mengawasi etika pada komite ini. Hal ini lantas menjadi tanggung jawab bagi Dewan Direksi, pembuat kebijakan, dan investor untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada karakteristik komite audit dalam menentukan pengungkapan etika perusahaan.

Berdasarkan Yuen, Liu, Zhang dan Lu (2009), adanya komite audit berkaitan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela seperti struktur dewan dan kepentingan pemangku kepentingan, sedangkan Forker (1992) berpendapat bahwa komite audit adalah salah satu mekanisme pemantauan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dan sistem pengendalian internal sambil membantu mengurangi biaya agensi.

Hussain Alkdai (2012) menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab komite audit terhadap pelaporan keuangan tidak berubah, tantangannya adalah memilih dan menempatkan orang dengan pikiran yang tepat dalam komite audit. Secara khusus, karakter komite audit seperti jumlah anggota, frekuensi rapat, independensi, dan keahlian komite audit merupakan hal penting untuk memastikan efektifitas komite audit. Penelitian-penelitian yang dilakukan Abbott dan Parker pada tahun 2000, Beasley dkk pada tahun 2000, Carcello dan Neal pada tahun 2003, dan juga Raghunandan, Read, dan Rama pada 2001 menyatakan bahwa karakteristik komite audit yang tepat



sangat penting untuk memberikan dampak kepada komite audit dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan hanya mempertahankan kehadirannya.

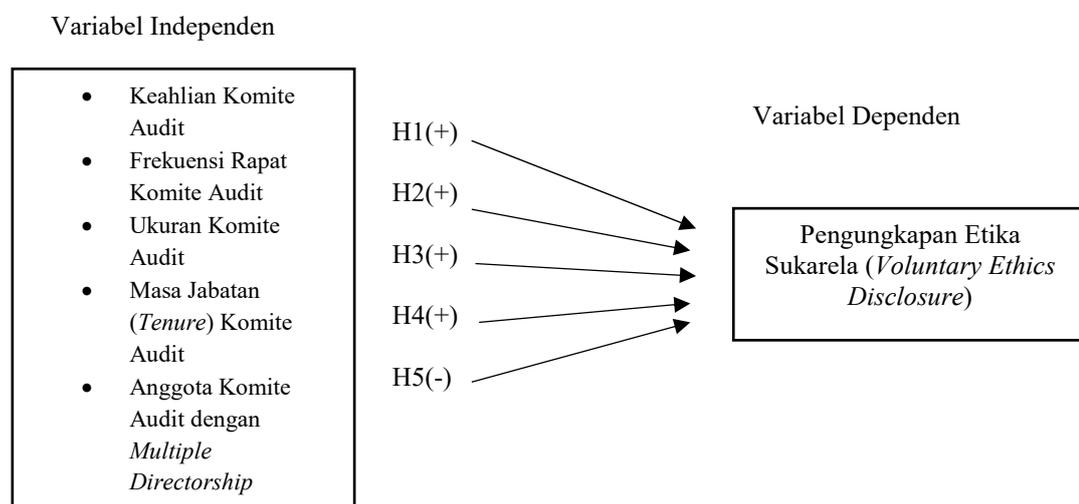
Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk memeriksa apakah karakteristik komite audit benar-benar mempengaruhi pengungkapan etika? Pertanyaan penelitian berikut menjadi dasar untuk penelitian ini; apa dampak karakteristik komite audit atau ciri-ciri yang dimiliki oleh komite tersebut pada *voluntary ethics disclosure* atau pengungkapan etika sukarela? Ciri-ciri komite audit seperti keahlian anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, masa jabatan anggota komite audit, dan juga anggota dengan *multiple directorship* adalah karakter-karakter yang ditelaah dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018 karena perusahaan-perusahaan publik pasti cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan apabila perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik maka perusahaan tersebut cenderung memiliki mekanisme pengawasan tentang hal hal berkaitan dengan etika.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kode etik merepresentasikan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang ditetapkan oleh perusahaan guna memastikan keseluruhan perusahaan mematuhi dan mengikuti kode etik serta berperilaku etis. Menurut Marnburg (2000) dan Preuss (2009), kode etik, kebijakan etis, pedoman etis, perilaku bisnis seperti prinsip operasi dan laporan perilaku bisnis dan prinsip, seluruh istilah-istilah tersebut mengacu pada kode etik. Selain mematuhi peraturan yang ada dan berperilaku secara etis, perusahaan juga perlu melakukan pengungkapan etika dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan tata kelolanya. Pengungkapan etika termasuk dalam pengungkapan dalam bentuk sukarela. Definisi dari pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* adalah sebuah pengungkapan di mana pengungkapan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu pengungkapan tersebut dilakukan melebihi persyaratan pengungkapan yang diwajibkan (Qu, Cooper, Wise dan Leung, 2012).

Berdasarkan Yuen, Liu, Zhang dan Lu (2009), adanya komite audit berkaitan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela seperti struktur dewan dan kepentingan pemangku kepentingan, sedangkan Forker (1992) berpendapat bahwa komite audit adalah salah satu mekanisme pemantauan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dan sistem pengendalian internal sambil membantu mengurangi biaya agensi. Penelitian-penelitian yang dilakukan Abbott dan Parker pada tahun 2000, Beasley dkk pada tahun 2000, Carcello dan Neal pada tahun 2003, dan juga Raghunandan, Read, dan Rama pada 2001 menyatakan bahwa karakteristik komite audit yang tepat sangat penting untuk memberikan dampak kepada komite audit dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan hanya mempertahankan kehadirannya.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran





Pengaruh Keahlian Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

The Public Oversight Board (POB, 1993) menemukan bahwa anggota komite audit akan lebih efektif dalam melakukan pekerjaan mereka apabila terdapat proporsi anggota komite audit yang berkeahlian di aspek akuntansi, pengauditan, audit internal, dan pelaporan keuangan. Menurut Defind, Hann dan Hu (2005), perusahaan akan meningkatkan tata kelola perusahaannya apabila komite audit dari perusahaan tersebut beranggotakan seseorang yang berkeahlian dan berlatarbelakang keuangan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Persons (2009) menyebutkan bahwa anggota independen dari sebuah komite audit yang berkeahlian keuangan dan juga *accounting* lebih cenderung bisa untuk melakukan pendeteksian penyajian yang salah dalam keuangann serta transaksi usaha yang tidak wajar karena orang-orang tersebut perlu memenuhi *professional code of ethics* mereka sendiri demi menjaga nama baik mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan seharusnya lebih efektif karena komite audit dengan keahlian keuangan akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan dan hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H1: Keahlian komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan etika sukarela.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

Raghunandan dkk. 2001 menyoroiti bahwa sebuah komite audit yang bertemu lebih sering lebih mungkin untuk menjadi serba mengetahui, lebih rajin dan berpengetahuan luas tentang masalah audit dan akuntansi saat ini untuk melaksanakan tugas mereka. Persons (2009) menyatakan bahwa semakin sering sebuah komite audit bertemu, maka perusahaan lebih cenderung akan membuat pengungkapan etika sukarela.

Menurut Persons (2009) & Xhie dkk (2003), dalam memantau perusahaan, komite audit diharapkan akan semakin efektif apabila rapat semakin sering diadakan. Selain itu, semakin seringnya rapat diadakan oleh komite audit diharapkan akan membawa pada pengungkapan etika sukarela. Didasari oleh hal hal tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis seperti di bawah ini:

H2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan etika sukarela.

Pengaruh Ukuran Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

Penelitian oleh Persons (2009) menyatakan bahwa sebuah komite audit beranggotakan semakin banyak, maka pengungkapan etika akan kondusif karena terdapat kemungkinan yang lebih tinggi komite audit akan melibatkan anggota yang sangat etis yang dapat membawa pada pengungkapan etika. Penelitian sebelumnya (Dalton, Daily, Johnson dan Ellstrand., 1999) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dan fungsi pengawasan dari badan yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengharapkan akan lebih efektif anggota komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan apabila komite audit tersebut beranggotakan semakin banyak orang. Selain itu, hal tersebut diharapkan akan menuntun pada pengungkapan etika. Maka dari itu, hipotesis berikut diusulkan:

H3: Ukuran Komite audit berpengaruh positif pada Pengungkapan Etika Sukarela

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit pada Pengungkapan Etika Sukarela

Semakin lama seorang komite audit menjabat maka akan membawa pada lebih tingginya kinerja, pemantauan, efektivitas, pengalaman, dan pemahaman, untuk mengatasi aktivitas perseroan (Bedard dkk., 2004; Thoopsamut dan Jikengkit,2009). Penelitian yang dilakukan Persons (2005) menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan komite audit memungkinkan lebih rendahnya kecurangan (*fraud*). Maka pada penelitian ini dinyatakan bahwa semakin lama anggota komite audit menjabat maka anggota komite audit tersebut akan lebih efektif dalam memantau perusahaan dan akan membawa pada pengungkapan etika.

H4: Masa jabatan komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan etika sukarela.



Pengaruh Anggota Komite dengan *Multiple Directorship* pada Pengungkapan Etika Sukarela

Directorship mendeskripsikan keanggotaan pengurus yang melayani banyak dewan.. Waktu dan usaha lebih banyak dibutuhkan oleh anggota komite audit dengan *multiple directorship* untuk secara efektif memantau manajemen manajemen (Morck, Shleifer & Vishny, 1988; Persons, 2005). Menurut Core et al. (1999), Fich dan Shivdasani (2006) dan Liu & Sun (2010) pengurus yang memiliki *directorship* banyak akan terlalu sibuk dan waktu yang dimiliki tidak mencukupi untuk mengawasi manajemen. Hal tersebut menimbulkan efektifitas yang rendah dalam pengawasan. Sedang berdasarkan Core, Holthausen & Larcker (1999), anggota dengan *multiple directorship* memiliki pemeriksaan yang tidak cukup terhadap manajemen. Oleh karena itu, pada penelitian ini dinyatakan apabila seorang anggota komite audit memiliki semakin banyak jabatan (*directorship*), maka akan berkurang pula keefektivitasan anggota komite audit tersebut, serta semakin sedikit kemungkinan perusahaan akan membuat pengungkapan etika. Maka dari itu, riset ini mengusulkan hipotesis keenam sebagai berikut:

H5: Anggota komite audit dengan *multiple directorship* berpengaruh negatif pada pengungkapan etika sukarela.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Etika Sukarela. Pengungkapan Etika Sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan melebihi pengungkapan yang dimandatkan atau diwajibkan, dalam penelitian ini pengungkapan sukarela yang dimaksud adalah pengungkapan etika. Pengungkapan Etika Sukarela pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 18 aspek Pengungkapan Etika Sukarela yang diadopsi dari Persons (2009). Selain itu, untuk mengetahui distribusi frekuensi perusahaan yang melakukan Pengungkapan Etika Sukarela pada penelitian ini adalah dengan melabeli '1' untuk perusahaan yang melakukan pengungkapan etika sukarela dan label '0' untuk perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan etika sukarela.

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen. Lima variabel independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keahlian Komite Audit (AUDACC)
Keahlian komite audit yang dimaksud adalah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Untuk mengukur variabel ini adalah dengan menggunakan angka persentase anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dengan total anggota komite audit.
2. Frekuensi Rapat Komite Audit (AUDMET)
Frekuensi rapat komite audit dapat didefinisikan sebagai seberapa sering komite audit mengadakan rapat. Pada penelitian ini variabel frekuensi rapat komite audit diukur dengan jumlah rapat yang diadakan komite audit dalam setahun.
3. Ukuran Komite Audit (AUDSIZE)
Ukuran rapat komite audit dapat didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit. Untuk pengukuran variabel ini digunakan jumlah total anggota komite audit.
4. Masa Jabatan Komite Audit (AUDTEN)
Masa jabatan komite audit dapat didefinisikan sebagai seberapa lama anggota komite audit menjabat. Untuk pengukuran variabel ini digunakan rata-rata masa jabatan komite audit.
5. Anggota Komite Audit dengan *Multiple Directorship* (DIRSHIP)
Anggota komite audit dengan *multiple directorship* adalah anggota komite audit yang memiliki lebih dari satu keanggotaan atau dengan kata lain memiliki keanggotaan di perusahaan lain. Variabel anggota komite audit dengan *multiple directorship* diukur dengan menggunakan rata-rata *directorship* yang dimiliki oleh anggota komite audit.



Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam daftar 100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia.
3. Perusahaan yang mempunyai data lengkap yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel karakteristik komite audit pada pengungkapan etika sukarela. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$ETHICS\ DISCLOSURE = \beta_0 + \beta_1AUDACC + \beta_2AUDMET + \beta_3AUDSIZE + \beta_4AUDTEN + \beta_5DIRSHIP + \varepsilon$$

Keterangan

- INAUD : Independensi Komite Audit
- AUDACC : Keahlian Komite Audit
- AUDMET : Frekuensi Rapat Komite Audit
- AUDSIZE : Ukuran Komite Audit
- AUDTEN : Masa Jabatan Komite Audit
- DIRSHIP : Multiple Directorships Komite Audit
- ε : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 1
Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Seratus (100) perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018	100
2.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian	(2)
3.	Total Pengamatan	98

Pada tahun 2018, dari 100 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, terdapat dua perusahaan yang laporannya tidak lengkap dan/atau tidak tersedia. Total sampel dari penelitian ini adalah 98.

Analisis Statistik Deskriptif

Table 2
Hasil Distribusi Frekuensi

Ethics Disclosure



Mean Score	0.95
Ethics Disclosure	5.1%
Non Ethics Disclosure	94.9%

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019

Tabel 2 menunjukkan nilai mean dari Pengungkapan Etika adalah 0,95 yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh perusahaan dari total sampel menerapkan Pengungkapan Etika. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa 94,9% (93 perusahaan) menerapkan Pengungkapan Etika sedangkan 5,1% (5 perusahaan) tidak mengungkapkan etika.

Selain itu terdapat 93 perusahaan (93 dari total 98 perusahaan, atau 94,89%) yang memiliki kode etik tertulis. Terdapat 93 perusahaan (93 dari total 98 perusahaan, atau 94,89%) yang memiliki komite khusus dewan direksi dengan tanggung jawab pengawasan terkait etika, komite yang dimaksud adalah komite audit. Hanya terdapat 10 dari total 98 perusahaan (10,20%) yang memiliki petugas etika perusahaan dan/atau petugas kepatuhan. Tidak terdapat perusahaan yang melakukan pengungkapan atas pertimbangan etika untuk menggaji direktur dan eksekutif. Tidak terdapat perusahaan yang mengubungkan etika dengan kompensasi eksekutif. Terdapat 43 dari 98 perusahaan (43,87%) yang memiliki pelatihan etika dan penandatanganan surat kepatuhan untuk karyawannya.

Terdapat 18 dari 98 perusahaan (18,36%) yang yang memelihara catatan perusahaan yang akurat. Terdapat 44 dari 98 perusahaan (44,89%) yang melakukan komunikasi dengan publik. Terdapat 53 dari 98 perusahaan (54,081%) mengungkapkan tentang benturan kepentingan antara hubungan pribadi dan professional. Terdapat 49 dari 98 perusahaan (50%) yang memiliki perlakuan untuk informasi rahasia. Terdapat 38 dari 98 perusahaan (38,77%) mengatur tentang penggunaan aset milik perusahaan. Terdapat 19 dari 98 perusahaan (19,38%) yang mengatur tentang nepotisme. Terdapat 85 dari 98 perusahaan (86,73%) yang memiliki kode etik tentang pelaporan keluhan akuntansi dan perilaku ilegal dan tidak etis. Terdapat 30 dari 98 perusahaan (30,61%) yang memiliki peraturan tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tentang diskriminasi, pelecehan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Terdapat 37 dari 98 (37,75%) perusahaan yang memiliki peraturan tentang penyuaapan komerisal.

Terdapat 23 dari 98 perusahaan (23,46%) yang mengatur tentang persaingan dan *fair dealing*. Terdapat 80 dari 98 perusahaan (83,67%) yang mengatur tentang *insider's trading*. Terdapat 86 dari 98 perusahaan (87,75%) yang mengungkapkan tindakan disipliner atas pelanggaran terhadap kode etik.

Table 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
AUDACC	98	0,25	1,00	0,4957	0,21280
AUDMET	98	1	52	9,122	8,8449
AUDSIZE	98	2,00	6,00	3,337	0,7172
AUDTEN	98	1,00	12,3	4,279	2,1042
DIRSHIP	98	0	6,67	1,7167	1,46997

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019

Tabel 3 menyajikan Variabel keahlian komite audit (AUDACC) memiliki nilai minimum 0,25 dan nilai maksimum 1. Nilai maksimum atau tertinggi pada variabel ini adalah 1 yang



berarti seluruh personil komite audit berkeahlian dan berlatarbelakang akuntansi dan/atau keuangan, sedangkan nilai terendah 0,25 menunjukkan bahwa hanya 25% personil komite audit yang berkeahlian keuangan dan/atau akuntansi. Nilai rata-rata adalah 0,4957, yang berarti kebanyakan komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel memiliki anggota berkeahlian akuntansi dan keuangan sekitar 49,57% dari total anggota. Sedangkan nilai deviasi standar pada variabel AUDAC adalah 0,21280. Nilai deviasi standar menunjukkan bahwa lebih besarnya mean dibandingkan nilai deviasi standar yang artinya variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

Variabel frekuensi rapat komite audit (AUDMET) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 52. Nilai maksimum atau tertinggi menunjukkan bahwa komite audit melakukan rapat sebanyak 52 kali dalam setahun dan nilai terendah menunjukkan komite audit hanya melakukan rapat 1 kali dalam satu tahun. Mean sebesar 9,122 yang berarti kebanyakan komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel melakukan rapat sebanyak 9 kali dalam setahun. Sedangkan nilai deviasi standar adalah sebesar 8,8449 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada variabel ini lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang artinya variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

AUDSIZE atau variabel ukuran komite audit mempunyai nilai minimal 2 dan nilai maksimal 6. Nilai tertinggi pada variabel ini menunjukkan bahwa komite audit beranggotakan 6 orang dan nilai terendah komite audit beranggotakan 2 orang. Mean sebesar 3,337 mengindikasikan bahwa kebanyakan komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel memiliki anggota sebanyak 3 orang. Selain itu, nilai deviasi standar sebesar 0,7172 memperlihatkan nilai deviasi standar lebih kecil dibandingkan mean yang artinya variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

Variabel masa jabatan komite audit (AUDTEN) memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 12,3 menunjukkan nilai tertinggi anggota komite audit menjabat adalah 12 tahun dan nilai terendah 1 tahun. Mean sebesar 4,279 mengindikasikan bahwa kebanyakan anggota komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel memiliki masa jabatan sekitar 4 tahun. Selain itu, nilai deviasi standar adalah sebesar 2,1042 menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

Variabel anggota komite audit dengan *multiple directorship* (DIRSHIP) memiliki nilai minimal sebanyak 0 dan nilai maksimal sebanyak 6,67. Nilai tertinggi adalah anggota komite audit memiliki sekitar 6 *directorship* dan nilai terendah adalah anggota komite audit tidak memiliki *multiple directorship* sama sekali atau tidak menjabat dan tidak memiliki keanggotaan di perusahaan lain. Nilai rata-rata pada penelitian ini adalah 1,7167 yang mengindikasikan bahwa kebanyakan anggota komite audit pada perusahaan-perusahaan sampel memiliki satu sampai dua jabatan di perusahaan lain. Selain itu, nilai deviasi standar adalah 1,46997. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar lebih kecil dibandingkan mean yang berarti variabel ini memiliki varian sebaran yang sempit.

Pada penelitian ini, hipotesis akan diuji menggunakan regresi linear berganda. Terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi linear berganda, di antaranya sebagai berikut:

Hasil Pengujian Hipotesis

Table 4
Hasil Regresi Linear Berganda (Uji t)
Uji t



Variabel	B	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	3,728	2,227	0,028	
AUDACC	0,483	0,352	0,726	Tidak berpengaruh
AUDMET	0,901	2,281	0,025	Berpengaruh positif
AUDSIZE	1,805	4,425	0,000	Berpengaruh positif
AUDTEN	1,594	1,977	0,051	Berpengaruh positif
DIRSHIP	-0,999	-2,332	0,022	Berpengaruh negatif

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019
Tingkat signifikansi 10%

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Pada penelitian ini, hipotesis pertama menyatakan keahlian komite audit secara positif mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menghasilkan nilai koefisiensi 0,483 dan nilai signifikansi 0,726 > 0,10. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Penolakan hipotesis pertama ini dapat diartikan bahwa ada atau tidaknya anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan tidak berpengaruh dengan pengungkapan etika sukarela

Selain itu, ditolaknya hipotesis pertama ini juga sejalan dengan penelitian oleh Othman dkk (2014). Menurut Othman dkk (2014), apabila keahlian komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan etika pada suatu perusahaan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa anggota komite audit yang memiliki berkeahlian keuangan tidak menjamin pengungkapan etika dilakukan dalam perusahaan, karena anggota komite audit itu sendiri mungkin tidak menegakkan etika dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis ketiga menunjukkan hasil nilai koefisiensi sebesar 0,901 dan nilai signifikansi 0,025 < 0,10. Dari nilai koefisiensi dan signifikansi tersebut dapat dikatakan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada pengungkapan etika sukarela, artinya semakin sering komite audit mengadakan rapat maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan membuat pengungkapan etika sukarela. Oleh karena itu hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.

Hipotesis ketiga yang diterima dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Raghunandan dkk (2001) bahwa komite audit yang melakukan rapat lebih sering cenderung lebih terinformasi dengan baik, lebih rajin, dan lebih berpengetahuan tentang isu-isu audit dan akuntansi terbaru dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, Xie dkk. (2003) juga menyatakan bahwa jumlah rapat memiliki hubungan negatif dengan akural diskresioner. Persons (2009) juga menemukan bahwa semakin sering sebuah komite audit pada suatu perusahaan bertemu atau mengadakan rapat, maka perusahaan tersebut lebih tinggi kecenderungannya untuk membuat pengungkapan etika sukarela.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Dalam penelitian ini hipotesis keempat menyatakan ukuran komite audit mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Uji hipotesis dalam penelitian ini menghasilkan nilai koefisiensi 1,805 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,10 untuk hipotesis keempat. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Diterimanya hipotesis keempat dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Persons (2009) bahwa komite audit dengan ukuran lebih besar atau jumlah anggota yang lebih banyak akan menggiring kepada dilakukannya pengungkapan etika karena terdapat kemungkinan bahwa sebuah



komite audit akan melibatkan anggota-anggota yang beretika tinggi di mana anggota-anggota tersebut dapat membawa pada pengungkapan etika sukarela. Selain itu, diterimanya hipotesis ini juga sejalan dengan pendapat Dalton, Daily, Johnson dan Elstrand pada tahun 1999 yaitu terdapat hubungan positif antara ukuran suatu komite dan fungsi pemantauan dewan yang akan membawa pada kinerja yang lebih baik.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa masa jabatan komite audit mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis, didapatkan nilai koefisiensi sebesar 1,594 dan nilai signifikansi sebesar $0,051 < 0,10$. Berdasarkan nilai koefisiensi dan nilai signifikansi yang telah diperoleh, dapat dikatakan bahwa masa jabatan komite audit mempengaruhi pengungkapan etika secara signifikan dan positif, yang artinya semakin seorang komite audit menjabat maka besar kemungkinannya perusahaan untuk mengungkapkan etika secara sukarela. Berdasarkan nilai koefisiensi dan signifikansi hipotesis kelima, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima atau tidak ditolak.

Diterimanya hipotesis kelima pada penelitian ini sejalan dengan pendapat Bedard dkk (2004) yang dikutip kembali oleh Thoopsamut dan Jiakengkit (2009) yaitu semakin panjang masa jabatan anggota komite audit maka akan membawa perusahaan pada lebih tingginya kinerja, efektivitas, pemantauan, pengalaman dan wawasan untuk menangani aktivitas-aktivitas perusahaan. Selain itu, berdasarkan penelitian Persons (2009), anggota komite audit yang menjabat lebih lama maka kecenderungan fraud di perusahaan tersebut akan semakin rendah.

Pengaruh Anggota Komite Audit dengan *Multiple Directorship* terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis terakhir dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite audit dengan *multiple directorship* mempengaruhi pengungkapan etika sukarela. Berdasarkan pengujian hipotesis, didapatkan nilai koefisiensi sebesar -0,999 dan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,022$, dari nilai-nilai tersebut dapat dikatakan bahwa anggota komite audit dengan *multiple directorship* mempengaruhi pengungkapan etika sukarela secara negatif dan signifikan, yang artinya semakin banyak *directorship* yang dimiliki anggota komite audit maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan pengungkapan etika sukarela. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis terakhir dalam penelitian ini diterima.

Diterimanya hipotesis terakhir dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Core dkk, (1999), Fich & Shivdasani (2006) dan Liu & Sun (2010) yaitu pengurus yang memiliki *directorship* atau jabatan terlalu banyak tidak memiliki waktu yang memadai dan terlalu repot untuk mengawasi manajemen dan hal tersebut membawa pada efektivitas yang rendah dalam pengawasan. Selain itu, menurut Core, Holthausen dan Lacker (1999), anggota dengan *multiple directorship* memiliki pemeriksaan yang tidak cukup terhadap manajemen

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak yang diberikan karakteristik komite audit yaitu keahlian, frekuensi rapat, ukuran, masa jabatan komite audit, dan anggota komite audit dengan *multiple directorship*, pada pengungkapan etika sukarela. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perseroan-perseroan yang termasuk dalam 100 perusahaan kapitalisasi terbesar di BEI pada tahun 2018. Setelah dilaluinya tahap terkumpulnya, terolahnya, teranalisis data, dan terinterpretasinya hasil, maka diperoleh beberapa kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Keahlian komite audit tidak berdampak secara signifikan pada pengukuran etika sukarela.



2. Frekuensi rapat komite audit berdampak secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. tugasnya dan akan membawa pada perusahaan pada pengungkapan etika.
3. Ukuran komite audit berdampak secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela.
4. Masa jabatan komite audit berdampak secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela.
5. Komite audit dengan *multiple directorship* berdampak secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela.

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa keterbatasan, di antaranya seperti di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan ini hanya memakai sampel selama 1 periode (satu tahun).
2. Index untuk mengukur pengungkapan etika sukarela masih menggunakan index dari Persons (2009) yang artinya indeks tersebut belum diperbarui selama 10 tahun.
3. Masih terdapat 74,6% faktor-faktor lain selain variabel keahlian anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit dan anggota komite audit dengan *multiple directorship* yang dipakai pada penelitian ini yang dapat dikaji dalam memprediksi variabel dependen.

REFERENSI

- Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics. *Auditing*.
- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Raghunandan, K. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. *Auditing*.
- Abdur Rouf. (2011). Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh. *African Journal of Business Management*.
- Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board ownership, audit committees' effectiveness, and corporate voluntary disclosures. *Asian Review of Accounting*.
- Barry, C. B., & Brown, S. J. (1985). Differential Information and Security Market Equilibrium. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. *Accounting Horizons*.
- Bédard, J., Chtourou, S. M., & Courteau, L. (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. *Auditing*.
- Belkaoui, A. R. (2001). Level of Multinationality, Growth Opportunities and Size as Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures. *American Business Review*, 11(2), 115–120.
- Braswell, M. K., Foster, C. M., & and Poe, S. L. (n.d.). A New Generation of Corporate Codes of Ethics. *Southern Business Review*, 1–10.
- BRC. (1999). The report and recommendations of the Blue Ribbon Committee (BRC) on improving the effectiveness of corporate audit committees. *Business Lawyer*.
- Bronson, S. N., Carcello, J. V., & Raghunandan, K. (2006). Firm characteristics and voluntary management reports on internal control. *Auditing*.
- Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2003). Audit committee characteristics and auditor dismissals following “new” going-concern reports. *Accounting Review*.



- Chau, G. K., & Gray, S. J. (2002). Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore. *International Journal of Accounting*.
- Chow, C. W., & Wong-Boren, A. (1987). Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporations. *Accounting Review*.
- Cleek, M. A., & Leonard, S. L. (1998). Can corporate codes of ethics influence behavior? *Journal of Business Ethics*.
- Cooke, T. E. (1989). Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*.
- Core, J. E., Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (1999). Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. *Journal of Financial Economics*.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., & Ellstrand, A. E. (1999). Number of directors and financial performance: A meta-analysis. *Academy of Management Journal*.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*.
- Defond, M. L., Hann, R. N., Xuesong, H. U., & Engel, E. (2005). Does the market value financial expertise on audit committees of boards of directors? *Journal of Accounting Research*.
- Diamond, D. W., & Verrechia, R. E. (1991). Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital. *The Journal of Finance*.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Felo, A. J., Krishnamurthy, S., & Solieri, S. A. (2005). Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis. *SSRN Electronic Journal*.
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Are busy boards effective monitors? *Journal of Finance*.
- Fishman, M. J., & Hagerty, K. M. (1989). Disclosure Decisions by Firms and the Competition for Price Efficiency. *The Journal of Finance*.
- Forker, J. J. (1992). Corporate Governance and Disclosure Quality. *Accounting and Business Research*.
- Gul, F. A., & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors' expertise and voluntary corporate disclosures. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Hackman, J. R. (1990). *Groups that Work*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*.
- Hashim, F and Mohd Saleh, N. (2007). Voluntary Annual Report Disclosures by Malaysian Multinational Corporations. *Malaysian Accounting Review*, 6(1), 129–156.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. Van. (1992). *Accounting Theory* (5th Ed). Homewood, IL : Irwin.
- Hossain, M., Perera, M. H. B., & Rahman, A. R. (1995). Voluntary Disclosure in the Annual Reports of New Zealand Companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*.
- Hussain Alkdai, H. K., & Hanefah, M. M. (2012). Audit committee characteristics and earnings management in Malaysian Shariah-compliant companies. *Business & Management Review*.



- Hussain Alkdai, H. K., & Hanefah, M. M. (2012). Audit committee characteristics and earnings management in Malaysian Shariah-compliant companies. *Business & Management Review*.
- Indonesia, O. J. K. R. (2015). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Diakses pada tanggal 4 November 2019, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015.aspx>
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*.
- Lefkowitz, J. (2006). The constancy of ethics amidst the changing world of work. *Human Resource Management Review*.
- Leone, M. (2010). Ethics and The Bottom Line. Retrieved from www.cfo.com/article.cfm/14504175
- Lin, Z. J., Xiao, J. Z., & Tang, Q. (2008). The roles, responsibilities and characteristics of audit committee in China. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Liu, G., & Sun, J. (2010). Director tenure and independent audit committee effectiveness. *International Research Journal of Finance and Economics*.
- Marnburg, E. (2000). The Behavioral Effects of Corporate Ethical Codes: Empirical Finding and Discussion. *Business Ethics: A European Review*, 9(3), 200–210.
- McMullen, D. a, & Raghunandan, K. (1996). Enhancing Audit Committee Effectiveness. *Journal of Accountancy*.
- Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures By U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*.
- Mohd Ghazali, N. A., & Weetman, P. (2006). Perpetuating traditional influences: Voluntary disclosure in Malaysia following the economic crisis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation. An empirical analysis. *Journal of Financial Economics*.
- Muhamad, R., Shahimi, S., Yahya, Y., & Mahzan, N. (2009). Disclosure Quality on Governance Issues in Annual Reports of Malaysian PLCs. *International Business Research*.
- Pallant, J. (2001). *The SPSS survival manual: A Step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows*. St Leonards, NSW: Allen & Unwin.
- Pater, A., & Van Gils, A. (2003). Stimulating ethical decision-making in a business context: Effects of ethical and professional codes. *European Management Journal*.
- Persons, O. S. (2005). The Relation Between the New Corporate Governance Rules and the Likelihood of Financial Statement Fraud. *Review of Accounting and Finance*.
- Persons, O. S. (2009). Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms. *International Journal of Disclosure and Governance*
- Persons, O. S. (2013). Characteristics and financial performance of no-ethics-code firms. *Journal of Academic & Business Ethics*.
- Peters, G. F., Abbott, L. J. and Parker, S. (n.d.). Voluntary Disclosures and Auditor Specialization: The Case of Commodity Derivative Disclosures. 1–30.



- Pradana, B. W. (2016). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit pada Pengungkapan Etika*.
- Preuss, L. (2009). Ethical sourcing codes of large UK-based corporations: Prevalence, content, limitations. *Journal of Business Ethics*.
- PricewaterhouseCoopers. (2000). *Audit Committee Effectiveness: What Works Best (2nd Edition)*. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Public Oversight Board. (1993). *In the Public Interest: A Special Report by the Public Oversight Board of the SEC Practice Section, AICPA. Stamford, CT: POB*.
- Public Oversight Board. (1994). *Strengthening the Professionalism of the Independent Auditor. Stamford, CT: POB*.
- Qu, W., Cooper, B. J., Wise, V., & Leung, P. (2012). Voluntary Disclosure in a Changing Regulatory Environment—Evidence from Chinese Stock Market. *International Journal of Economics and Finance*.
- Raghunandan, K., Read, W. J., & Rama, D. V. (2001). Audit committee composition, “gray directors,” and interaction with internal auditing. *Accounting Horizons*.
- Rahman, R. A., & Mohamed Ali, F. H. (2006). Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence. *Managerial Auditing Journal*.
- Rezaee, Z., Szendi, J., Elmore, R. E., & Zhang, R. (2012). Corporate governance and ethics education: Viewpoints from accounting academicians and practitioners. In *Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations (Vol. 13)*.
- Shivdasani, A., & Yermack, D. (1999). CEO involvement in the selection of new board members: An empirical analysis. *Journal of Finance*.
- Steiner, I. D. (1972). *Group Process and Productivity*. New York: Academic Press.
- Sullivan, J. D. And Shkolnikov, A. (2006). *Business Ethics: The Essential Component of Corporate Governance, Center for International Private Enterprise*. 1–16.
- Thoopsamut, W. and Jiakengkit, A. (2009). Audit committee characteristics, audit firm size and quarterly earnings management in Thailand. *8(1)*, 3–12.
- Valentine, S., & Barnett, T. (2003). Ethics code awareness, perceived ethical values, and organizational commitment. *Journal of Personal Selling and Sales Management*.
- Voluntary annual report disclosures by Malaysian multinational corporations. (2007). *Malaysian Accounting Review*.
- Watson, A., Shrivess, P., & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK. *British Accounting Review*.
- William E. Bealing, J., & Baker, R. L. (2006). The Sarbanes-Oxley Act: Have We Seen It All Before? *Journal of Business & Economic Studies*.
- Wittmer, D. P. (2001). Ethical Decision-making. In T. L. Cooper (Ed.), *Handbook of Administrative Ethics. New York: Marcel Dekker.*, 2, 481–507.
- Xie, B., Davidson, W. N., & Dadalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*.
- Yang, J. S., & Krishnan, J. (2005). Audit Committees and Quarterly Earnings Management. *International Journal of Auditing*.
- Yuen, C. Y. D., Steven, Z. X., Morris, L. M., & Lu, V. C. (2010). A Case Study of Voluntary Disclosure by Chinese Enterprises. *Asian Journal of Finance & Accounting*.